



## ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

**Khairuna**

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

**Rahmah Yulianti\***

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

**Cut Hamdiah**

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

\*Corresponding Author: rahmah.yulianti@serambimekkah.ac.id

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis dekriptif. Aktivitas meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh menyajikan 6 dari 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh tidak menyajikan Laporan Arus Kas (LAK) karena SKPD tidak ada kegiatan investasi dan dalam pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Aceh SKPD diibaratkan sebagai kantor cabang (*branch office*) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) sebagai kantor pusat (*home office*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di lihat dari perbandingan komponen laporan keuangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh secara penuh menerapkan PP No. 71 Tahun 2010.

### Kata Kunci:

*Standar Akuntansi Pemerintahan; Akuntansi Berbasis Akrual; Laporan Keuangan.*

**Sitasi:** Khairuna, Rahmah Yulianti, Cut Hamdiah. (2025). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Syariah*, 3(1), 33-42. Doi : 10.32672/jams.v3i1.3357

## PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di negara ini berdampak pada tuntutan masyarakat untuk mereformasi masalah keuangan negara kita, sehingga Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan

selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Akuntansi berbasis akrual menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 (2010:28) basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Yafie (2012:12) akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan, menurut Mardiana dan fahlevi (2017:32) akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Menurut Kusuma (2013:15) keutamaan berbasis akrual antara lain: menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya, informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah, lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya, standar yang dapat diterima umum, memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah, dan sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan untuk dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2015. SAP ini mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan 7 (tujuh) bentuk laporan keuangan yang wajib disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Instruksi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia telah ada sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan dapat diterapkan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kebijakan itu menegaskan, SAP yang digunakan harus berbasis akrual, tidak lagi berbasis kas sebagaimana diterapkan sebelumnya. Pemerintah Aceh sangat mendukung sistem pelaporan ini karena lebih mudah dibaca dan ditelusuri keabsahannya. Pemerintah Aceh telah memperkuat kebijakan ini dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh.

Fenomena yang terjadi di Pemerintah (Pemprov) Aceh pada tahun 2013 melalui Dinas Keuangan menggelar workshop Modul Penatausahaan Keuangan SKPA lingkup Pemerintah Aceh, kegiatan ini sangat penting sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah (Pemprov) Aceh masih menerapkan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basis*).

Pada tahun 2015 Pemerintah (Pemprov) Aceh sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014. Di tahun 2015 yang berarti bahwa siap atau tidak seluruh entitas pemerintah harus menerapkan basis akrual (*accrual basis*) dalam penyajian laporan keuangannya. Tetapi, masih ada keraguan atas kesiapan entitas pemerintah dalam menerapkan basis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 ini disebabkan beberapa faktor, antara lain masih sedikitnya laporan keuangan pemerintah yang berbasis kas menuju akrual yang dianggap layak. Setelah diberlakukannya basis akrual (*accrual basis*) di Pemerintah (Pemprov) Aceh tahun 2015 dan pada tahun 2016 Pemerintah (Pemprov) Aceh baru memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Penerapan basis akrual (*accrual basis*) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh pada tahun 2015 setelah adanya kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh yang berlaku bagi seluruh jajaran SKPA di Lingkup Pemerintahan Aceh. Dalam kegiatan ini Pemerintah (Pemprov) Aceh berharap, paling lambat pada tahun 2015, laporan keuangan Pemerintah Aceh sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di semua jajaran SKPA. Pemerintah (Pemprov) Aceh juga mengingatkan, BPK dalam melaksanakan auditnya juga akan merujuk kepada sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem ini dianggap lebih baik karena Pemerintah dapat mengidentifikasi posisi keuangan dan perubahannya, sehingga laporan sistem Akrual ini lebih terpercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu sistem basis kas (*cash basis*) yang selama ini berlaku akan di tinggalkan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh?

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Menurut Sugiyono (2012:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Suryana (2010:18) penelitian dekriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci. Penelitian ini biasanya tanpa menggunakan hipotesis yang dirumuskan secara ketat, tetapi ada yang menggunakan hipotesis tetapi bukan di uji secara statistik.

Sedangkan, menurut Sukmadinata (2011: 73) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dengan demikian diharapkan fenomena tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, kendala-kendala yang dihadapi dapat dideskripsikan secara gamblang untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti menggunakan kunci informasi (*key informan*) dalam penelitian, *key informan* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Kunci Informasi (*Key Informan*)**

| No. | Bagian                                       |
|-----|----------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelola Aset |
| 2.  | Bendahara Pengeluaran                        |
| 3.  | Bendaharawan Gaji                            |
| 4.  | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan      |
| 5.  | Pembantu Bendahara Pengeluaran               |
| 6.  | Pembantu Bendahara Pengeluaran               |
| 7.  | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan      |

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diteliti adalah laporan keuangan periode 31 Desember 2017. Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data Primer dan Skunder sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh melalui kepala dan staf di Subbagian Keuangan dan Pengelola Aset. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *interview* (wawancara). Menurut Sugiyono (2010:82) metode *Interview* yang sering disebut dengan wawancara atau *kuesioner* lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini metode *interview* digunakan untuk menggali data tentang sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak geografis obyek penelitian.
2. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh periode 31 Desember 2017. Untuk memperoleh data skunder peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.  
Agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan, maka digunakan berbagai pengumpulan data yang dilakukan dengan :
  1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Penelitian ini dilakukan agar dapat mendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, majalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
  2. Penelitian Lapangan  
Teknik pengumpulan data ini langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk teknik pengumpulan data lapangan peneliti menggunakan metode *observasi* (pengamatan). Menurut Sugiyono (2010:63) *observasi* disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini digunakan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan.

### Metode Analisis Data

## **ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH.**

Menurut Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan, menurut Ruhyat (2013:11) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2013: 337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis.

Langkah –langkah dalam analisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah sebagai berikut:

### **1. Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data, kemudian perlu diolah kembali. Pengolahan data tersebut memiliki tujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data yang telah terkumpul dan menyajikannya sudah tersusun dengan baik dan rapi kemudian baru dianalisis. Tahap-tahap dalam pengolahan data

- a. Penyuntingan (*editing*) merupakan kegiatan memeriksa seluruh laporan keuangan yaitu LRA, SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.
- b. Pengkodean (*coding*) adalah kegiatan setelah diakukannya penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu melakukan perbandingan dengan komponen laporan keuangan PP No. 71 tahun 2010.
- c. Tabulasi (*tabulating*) merupakan kegiatan menyusun dan juga membandingkan data.

### **2. Penganalisisan Data**

Apabila proses pengolahan data telah selesai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. kemudian tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan.

### **3. Penafsiran Hasil Analisis**

Kemudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil analisa data tersebut. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang sudah dirumuskan dengan hasil analisa data yang sudah diperoleh.

Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Basis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP ini mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual. Sedangkan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Aceh No. 30 tahun 2014 adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyajikan 6 dari 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh tidak menyajikan Laporan Arus Kas (LAK) karena SKPD tidak ada kegiatan investasi dan dalam pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Aceh SKPD diibaratkan sebagai kantor cabang (*branch office*) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) sebagai kantor pusat (*home office*). Dalam skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKA dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah Rencana Kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (RK-PPKA) dan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD). Fungsi akuntansi SKPKA harus mengidentifikasi aliran kas Bendahara Umum Aceh (BUA) kepada bendahara pengeluaran SKPD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD kepada BUA berdasarkan nota kredit.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dalam menyusun laporan keuangan tahunannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan basis akrual penuh serta berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 tahun 2014, maka laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA) berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
6. Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

# ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH.

Pengakuan Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh. Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Pengakuan Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d. Persediaan dicatat sebesar:
  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

## Pembahasan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP No. 71 Tahun 2010 berisi SAP berbasis akrual. SAP ini mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas.

Dalam PP No.71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

1. Jurnal Finansial untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran,
2. Jurnal Anggaran untuk mencatat seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Dinas Koperasi dan UKM Aceh selaku SKPD akan menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
6. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh selaku SKPD hanya menyajikan 6 dari 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh tidak menyajikan laporan arus kas karena SKPD tidak ada kegiatan investasi dan dalam pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Aceh, SKPD diibaratkan sebagai kantor cabang (*branch office*) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) sebagai kantor pusat (*home office*).

Berdasarkan pembahasan tersebut dan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di lihat dari perbandingan komponen laporan keuangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh secara penuh menerapkan PP No. 71 Tahun 2010.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penyajian laporan keuangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyajikan 6 dari 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh tidak menyajikan Laporan Arus Kas (LAK) karena SKPD tidak ada kegiatan investasi dan dalam pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Aceh



# ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH.

SKPD diibaratkan sebagai kantor cabang (*branch office*) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) sebagai kantor pusat (*home office*). Laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari pembahasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di lihat dari perbandingan komponen laporan keuangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh secara penuh menerapkan PP No. 71 Tahun 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, dkk. 2013. *Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran, dan Implementasi Di Indonesia 2013*. STAR-BPKP.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Chairante, Muthia Dhuharana. 2016. *Basis Akuntansi Pemerintah yang Informatif. Basis Kas atau Basis Akrual*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. Padang.
- Devri Radistya, dkk. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual*. Jurnal D IV Akuntansi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Banten.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Alfabeta. Bandung.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fatmawati, Devia. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Friska Langelo, dkk. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1 Maret 2015. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi pertama cetakan ketujuh. Rajawali Pers : Jakarta.
- Lizma Nazrah, Hasan Basri, Muhammad Arfan. 2015. *Analisis Kesiapan Penerapan Basis Akrual dalam Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat)*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Vol. 4 No. 4. 2015. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Man Azwan, Mohammad. 2015. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah Analisis Deskriptif*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Mu'am, Ahmad. 2011. *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Mifaz Rasam Publishing. Tangerang.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Cetakan Kesepuluh. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Noerdiawan D, Iswahyudi, Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Novita, Ika. 2017. *Analisis Pengakuan Nilai Aset dan Kualitas Laporan Keuangan sebelum dan sesudah Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah, Kota dan Provinsi di Indonesia)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 30. 2014. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh*. Banda Aceh.
- \_\_\_\_\_. No. 80. 2014. *Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh*. Banda Aceh.
- \_\_\_\_\_. No. 106. 2013. *Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh*. Banda Aceh.

- Peraturan Pemerintah No. 8. 2006. *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 71. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Qanun Aceh No. 05. 2007. *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh.
- \_\_\_\_\_. No. 15. 2012. *Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh.
- Rizki Mardiana, dkk. 2017. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Setiawati Kusuma, Ririz. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Simanjuntak, Binsar H, 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*, Disampaikan Pada Kongres XI IAI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Jakarta
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Alfabeta. Bandung.
- Tickell, Geoffrey. 2010. *Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma*. *International Business&Economics research Journal*, 9 (11): 71-78.
- Tikk, Jutta. 2010. *Accounting Changes In The Public Sector In Estonia*. *Business:Theory and Practice*, 11 (1): 77-85.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1. 2004. *Bendaharaan Negara*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 17. 2003. *Keuangan Negara*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 25. 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. No. 32. 2004. *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- www.wikiapbn.com
- www.wikipedia.org